



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Operasi Zebra Semeru, Polresta Incar Balap Liar

SIDOARJO - Polresta Sidoarjo memulai gelaran Operasi Zebra Semeru 2025 kemarin (17/11). Delapan jenis pelanggaran menjadi atensi pada operasi yang akan berlangsung dua pekan itu. Salah satunya fenomena balap liar yang masih seringkali terjadi.

Ada sejumlah titik balap liar yang dipantau petugas. Semisal kawasan Arteri Proring. Pencegahan aksi balapan dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja.

CEK KESIAPAN: Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing memeriksa kendaraan yang akan dipakai Operasi Zebra Semeru.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menurunkan operasi berujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat. "Khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru," ujarnya setelah memimpin apel gelar pasukan.

Penindakan tidak menjadi prioritas utama. Operasi lebih memprioritaskan edukasi atau peringatan terhadap pelanggar.

"Dengan harapan pelanggar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi," ungkapnya.

Selain balap liar, ada tujuh pelanggar lain yang menjadi atensi. Di antaranya pemo-

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BERGEMBIRA: Ribuan PPPK paruh waktu meneriakkan yel-yel usai menerima SK pengangkatan kemarin (17/11). Sebagian besar dari mereka merupakan guru honorer.

✓ 3.862 PPPK Paruh Waktu Terima SK Pengangkatan

Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Masih Kurang

SIDOARJO – Sebanyak 3.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi menerima SK pengangkatan kemarin (17/11). Meski telah mengangkatribuan, namun jumlah pegawai dinilai masih kurang. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Kepala BKD Sidoarjo Misbahul Munir menambahkan bahwa masih ada kebutuhan tenaga P3K di Sidoarjo. Itu mengacu kebutuhan guru di sekolah-sekolah. "Dua sektor itu masih kami butuhkan dan diupayakan terpenuhi," kata Misbahul. Dia tak merinci berapa pegawai yang

diperlukan. Sebab saat ini BKD masih mendata.

Penyerahan SK PPPK dilakukan dalam apel di GOR Delta Sidoarjo, kemarin (17/11). Bupati Subandi menegaskan bahwa pengangkatan ribuan P3K paruh waktu ini merupakan bagian dari komitmen pemkab untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. "Kami ingin memastikan setiap ASN dan P3K bekerja dengan kompetensi sekaligus dengan hati," katanya.

Subandi mengungkapkan bahwa proses pengangkatan P3K paruh waktu melalui pembahasan panjang, termasuk upayanya memastikan dua kelompok honorer R3 dan R4 bisa diakomodasi sekaligus. Awalnya hanya R3 yang diusulkan, namun ia me-

negaskan tidak ingin ada pegawai honorer yang tertinggal. "Setelah dihitung kemampuan anggaran, saya pastikan R3 dan R4 diangkat semuanya. Ini perjuangan dua hari penuh agar tidak ada yang dipisah-pisah," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyindir persoalan integritas. Ia menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tidak memberi ruang bagi praktik gratifikasi maupun jual-beli jabatan. Subandi memastikan, proses rekrutmen dan penempatan P3K paruh waktu, kata dia, dilakukan sesuai regulasi dan manajemen talenta. "Tidak ada lagi bayar jadi camat atau bayar jadi kepala OPD. Semua sudah harus bersih," ujarnya. (eza/hen)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Lingkar Timur Dibeton, Jalan Raya Surabaya-Malang Macet

SIDOARJO – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) memperkuat Jalan Lingkar Timur ruas Banjarkemantren-Prasung, Buduran. Selama pengerjaan, kontraktor bersama instansi terkait memberlakukan *contraflow*. Akibat dari pembangunan, pengendara diminta mewaspadai kemacetan di sejumlah ruas jalan.

Dari pantauan kemarin (17/11), memang sempat terjadi kemacetan di Jalan Surabaya-Malang. Sejumlah kendaraan tampak antre sebelum masuk ke kawasan Lingkar Timur. Kemacetan juga terpantau di frontage road, dan Jalan Lingkar Timur sisi selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Dwi Eko

Saptono mengatakan bahwa penutupan jalan untuk pengerjaan betonisasi dimulai sejak Jumat (14/11). "Pengerjaan tahap pertama untuk sisi utara sampai ke Prasung," katanya.

Penutupan tersebut membuat jalan sisi selatan dijadikan dua arah. "Yang dilakukan dua arah sekitar 900 meter," kata Dwi. Dia mengatakan total jalan yang akan dibeton sepanjang 1,8 kilometer untuk dua sisi. Yakni utara dan selatan. Saat ini pengerjaan masih difokuskan bagian utara.

Menurut Dwi, pengerjaan Jalan Lingkar Timur sisi utara ditargetkan selesai pada akhir November. Projeknya masih cukup panjang. Sebab masih 800 meter jalan di sisi utara yang selesai dibeton. (eza/hen)



ANGGER BONDANI/JAWA POS

DIKEBUT: Betonisasi di sisi utara Jalan Lingkar Timur mulai dikerjakan dengan alat berat. Total jalur yang dibeton sepanjang 1,8 kilometer.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Efisiensi Pengelolahan Aset Desa, Pemdes Ploso Rehab Ruang Kades, Perangkat Serta Ruang Pelayanan

Sidoarjo, Pokok Kiri -

Bangunan desa merupakan Aset Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah dan Pemanfaatannya dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikannya.

Melalui APBDes Tahun anggaran 2025 pelaksanaan Pembangunan di bidang pekerjaan umum dan pemanfaatan Ruang pemerintah Desa Ploso Kecamatan Kremlung melakukan pembangunan Ruang Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Ruang Pelayanan dengan maksud

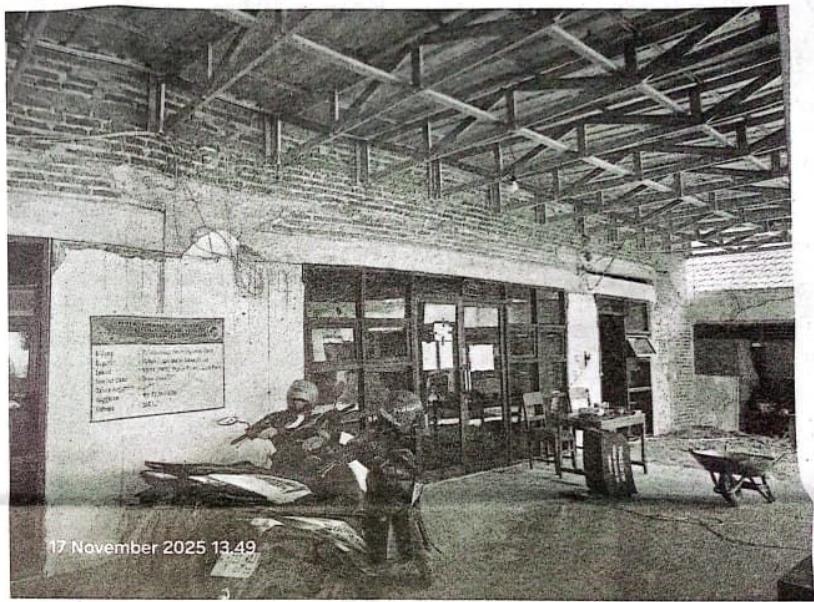
Penggunaan asset Desa sesuai fungsi pemenuhan kebutuhan masing-masing dalam rangka membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam keterangannya Su-

warsro Selaku pelaksana kegiatan menyampaikan "Pengelolaan Aset Desa berupa pembangunan Ruang Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Ruang Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan Pemerintah Desa di tahun 2025 mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dengan memprioritaskan Asas Efisiensi yaitu pengelolaan aset desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penye-

lenggaran tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal" Terangnya Semini (17/11).

"Ruang Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Ruang Pelayanan yang di bangun saat ini masih tahap pekerjaan dan kami pastikan sesuai dengan jangka waktu yang kita buat akan selesai sebelum akhir tahun, harapan kami sebagai warga Desa Ploso dengan dibangunnya kantor prasarana tersebut bisa membuat kerja mereka menjadi Nyaman dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal dalam hal menjalankan roda organisasi program pemerintahan desa," pungkasnya. (Nang)



17 November 2025 13.49

POJOK KIRI
KORANE RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Rehab RTLH Modin Koreksari

Sidoarjo, Pojok Kiri.-

Siti Sholimah tak henti-hentinya bersyukur saat rumahnya didatangi Bupati Sidoarjo H. Subandi, Sabtu, (15/11). Istri Modin Dusun Alang-alang Desa Kureksari Waru Imam Ghozali itu tahu bupati datang untuk memperbaiki rumahnya yang telah lama rusak. Nenek berusia 75 tahun itu juga tak henti-hentinya mendoakan bupati.

Bupati H. Subandi sendiri tak bisa menyembunyikan keprihatinannya akan kondisi Modin Imam Ghozali yang tinggal di rumah tidak layak huni itu. Rumah yang ditempati bertahun-tahun bersama istri dan seorang anaknya itu rusak parah. Kondisinya seperti rumah yang lama tidak dihuni. Mungkin bagi yang tidak tahu pasti mengira rumah itu telah lama kosong.

Bupati H. Subandi berjanji kepada Modin Imam Ghozali akan segera melakukan perbaikan rumahnya. Atapnya akan diganti dan akan dibangunnya kamar



mandi. Namun sebelumnya ia meminta seluruh perangkat desa bersama Baznas Sidoarjo untuk kerja bakti membersihkan rumah Modin Imam Ghozali.

"Besok mulai kerja bakti membersihkan rumah ini, sementara pak modin bersama istrinya ngekos dulu selama perbaikan dilakukan,"

pintanya kepada kepala Desa Kureksari bersama perangkatnya.

Modin Imam Ghozali mengaku tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Kerusakan paling parah ada pada atapnya. Pasti bocor kalau hujan. Selain itu ia tidak memiliki kamar mandi.

"Bertahun-tahun ru-

saknya," ucapnya singkat.

Namun ia bersyukur Pemdes Kureksari masih memperhatikannya. Kemarin ia mendapatkan bantuan material untuk atap rumahnya. Material galvalum itu hanya cukup dipasang disebagian rumahnya. Biaya pengjerajannya ditanggungnya sendiri. Anak-

anaknya yang membantu ongkos pengerajan atapnya kemarin.

"Arek-arek wis angkat tangan mari bantu bayar tukang," ucapnya.

Ketua Baznas Sidoarjo adalah M. Chasbil Aziz Salju Sodar mengatakan perbaikan akan dilakukan sesegera mungkin. Tim Baznas akan langsung turun setelah isi rumah Modin Iman Ghozali dibersihkan. Pasalnya didalam rumah tersebut banyak berserakan barang-barang yang tak terpakai.

"Inshaalloh satuh dua hari teman-teman dari Baznas akan melakukan perbaikan setelah kerja bakti dilakukan," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Jazuk mengatakan perbaikan difokuskan pada atap rumah dan pembangunan kamar mandi. Setelah itu dinding rumah akan dicatnya dan lantai rumah akan dikeramiknya. Ruang kamar tidur akan diperbaikinya juga. "Inshaalloh selesai dalam dua minggu," ujarnya. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORANE RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI DAMPINGI GUBERNUR JATIM GELAR PASAR MURAH DI KRIAN

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemprov Jawa Timur kembali menggelar Pasar Murah di Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (16/11). Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kelurahan Kemasan, Kecamatan Krian. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi). Beberapa komoditas yang ditawarkan seperti beras medium (SPHP) dengan harga Rp. 11.000 per kilogram, daging ayam Rp. 30.000 per kilogram, gula ID Food Rp. 14.000, dan Minyakita Rp. 13.000 per liter. Selain itu, tersedia pula aneka kebutuhan pokok lain seperti telur, bawang merah dan bawang putih.

Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sw ering kali menggelar Pasar Murah untuk memperluas jangkauan masyarakat mendapatkan akses sembako dengan harga murah sesuai dengan kebutuhan. Pasar Murah yang digelar pun diserbu ratusan masyarakat dan masyarakat boleh membeli selama perse-dian masih ada meski kupon yang dibagikan telah habis.

"Insya Allah yang kita jual di pasar murah ini mu-



rah sekali, dibawah HET, harga kita jauh di bawah HET. Kalau beras SPHP HET-nya Rp12.500, kita jual Rp11 ribu. Daging ayam HET-nya Rp34 ribu sampai Rp36 ribu, kita jual Rp30 ribu. Gula ID Food HET-nya Rp17.800, kita jual Rp14 ribu. Minyakita premium HET-nya Rp16.800, kita jual Rp13 ribu," ucapnya.

Hj. Khofifah Indar Parawan-sa berharap adanya pasar murah seperti ini dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kegiatan ini merupakan sinergi yang terus dibangun bersama pemerintah kabupaten dan kota.

"Kita melakukan pasar murah adalah untuk mendekatkan jangkauan dengan masyarakat agar bisa men-

gakses sembako harga murah semaksimal mungkin dan sebaiknya pasar murah ini jangan dekat dengan pasar tradisional, karena pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional," tambahnya.

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pasar murah tersebut. Menurutnya, harga sembako di pasaran masih

menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, kegiatan pasar murah perlu terus digencarkan.

"Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung kegiatan pasar murah seperti ini karena mampu menekan inflasi, menstabilkan harga, dan tentu saja memudahkan masyarakat Sidoarjo memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," ujarnya. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORANE RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Polresta Gelar Operasi Zebra Semeru 2025

Sidoarjo, Pojok Kiri -

Mulai Senin(17/11/2025) hingga dua pekan kedepan, Polisi menggelar Operasi Zebra Semeru 2025. Pada pelaksanaannya nanti pihak kepolisian menggandeng unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan stake holder terkait lainnya.

Di wilayah Kabupaten Sidoarjo Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025 dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, didampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Czi.

Shobirin Setio Utomo serta dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik, pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sidoarjo.

Operasi Zebra 2025 digelar secara serentak se-Indonesia mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas.

"Operasi Zebra Semeru 2025 digelar guna terwujudnya Kameltibcarlantas yang aman, nyaman dan mekanan terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat, khususnya jelang Natal dan tahun baru dalam pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025," kata Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

Pada pelaksanaannya operasi ini akan tetap mengedepankan tindakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Petugas akan

lebih banyak memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas, khususnya pelanggaran yang sering kali menjadi penyebab kecelakaan.

Adapun pelanggaran itu antara lain tidak memakai helm, melawan arus, serta melanggar batas kecepatan. Selain itu, sistem tilang elektronik juga akan tetap berjalan selama periode ini untuk mendeteksi pelanggar oleh kamera pengawas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menambahkan untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan lalu lintas maka diterapkan Operasi Zebra Semeru 2025.

"Operasi Zebra Semeru bukan semata penegakan hukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya. Karenaanya kepada seluruh personel yang menjalankan operasi ini, lakukan pelayan terbaik dalam tugas dan pengabdian kepada bangsa juga negara," lanjutnya. (Khol/Fs)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Alpda Osins Tarmo sebelah kanan anggota Kompi 3 Batalyon A Pelopor.

Peringati HUT ke-80, Brimob Gelar Acara Syukuran di Markas Kompi 3 Batalyon A Pelopor Porong

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Korps Brimob Polri memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 dengan menggelar acara syukuran di Markas Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Porong, Sidoarjo, Jumat 14 November 2025. Acara yang dimulai

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

pukul 08.00 WIB dan masih berlangsung hingga pukul 11.44 WIB tersebut dihadiri sejumlah Brimob

dari berbagai wilayah Jawa Timur serta pejabat dari Polda Jatim dan pemerintah daerah.

Aipda Osias Tarmo, salah satu anggota Kompi 3 Batalyon A Pelopor, menjelaskan bahwa peringatan tahun ini tidak berbentuk upacara penuh seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan digelar dalam format acara syukuran.

"Acara dimulai dari pembukaan, kemudian penyerahan penghargaan kepada anggota berprestasi serta pejabat, mulai dari pejabat Polda Jatim hingga bupati Madiun dan Banyuwangi. Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai peragaan seperti peragaan marching band dari Korps Brimob Polri yang menampilkan formasi dan musik kebanggaan satuan, serta aksi Srikandi Polwan Brimob yang menunjukkan atraksi keterampilan dengan penampilan yang memukau dan mendapatkan sambutan meriah dari para tamu undangan", ujarnya.

Aipda Osias menambahkan bahwa seluruh jajaran Brimob Jawa Timur hadir pada kegiatan ini, mulai dari Kompi Madura, jajaran Kompi Surabaya, hingga Kompi Banyuwangi yang merupakan kompi terbaru.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kapolida Jawa Timur, para pejabat lainnya di Polda Jatim, serta perwakilan dari Bupati Sidoarjo, Bupati Madiun, dan Bupati Banyuwangi.

Sebagai anggota yang juga terlibat dalam persiapan acara, Aipda Osias mengaku bangga dapat mengikuti perayaan HUT Brimob tahun ini. "Kami sangat bangga, terutama karena cara tahun ini diselenggarakan di markas kami, Kompi 3 Batalyon A Pelopor," ungkapnya.

Menurutnya, terdapat perbedaan pelaksanaan perayaan dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau biasanya ada upacara dan berbagai peragaan, tahun ini lebih banyak diisi dengan syukuran," jelasnya.

Aipda Osias juga menuturkan bahwa lokasi peringatan HUT Brimob biasanya ditentukan oleh pimpinan dan bergantian antara Polda Jatim, Sat Brimob, atau

Kompi 3 Batalyon A Pelopor. "Namun paling sering memang dilaksanakan di sini," tambahnya. (Nata)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW,BM PAN Jatim di Trawas, Mojokerto.

Anggota DPRD Roki Wardoyo Nahkoda Baru BM PAN Jawa Timur

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Jawa Timur memiliki ketua baru. Anggota Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Roki Wardoyo akan menahkodai organisasi kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur ini lima tahun ke depan. Roki terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW BM PAN Jatim di Trawas, Mojokerto yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu - Minggu 15-16 November 2025.

Lewat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Bidang POK DPP BM PAN, Eko Sulistyo, Roki berhasil mengungguli dua kandidat lainnya, Hairul Anwar dan Abdullah Asyi'Abul Huda. "Menetapkan, pengesahan Ketua Formatur Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Penegak Amanat Nasional Provinsi Jatim periode 2024 - 2029 atas nama Roki Wardoyo. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu, 16 November 2025, pukul 00.14 WIB," kata Eko Sulistyo membacakan keputusan pimpinan sidang.

Memperebutkan suara 65 voters, Roki Wardoyo berhasil memperoleh 40 suara, jauh di atas 2 pesaingnya, Hairul Anwar (20 suara) dan Abdullah (4 suara). Sementara satu suara dinyatakan tidak sah.

Dalam pidato kemenangannya, Roki mengajak semua kader BM PAN Jatim untuk bersatu-padu dan bersama-sama membesarkan partai. Ia meminta seluruh anggota BM PAN di Jawa Timur bekerja dan berkarya mendukung kerja-kerja pemenangan yang dilakukan PAN sebagai organisasi induknya.

"Setelah kompetisi ini kita kembali ke BM PAN Jatim, untuk bekerja, berkarya dan selalu mengikuti kebijakan partai. Mari kawan-kawan, setelah ini kita tidak usah banyak bicara, tapi kita harus berani tampil dan sukses dalam bidang politik atau bidang apapun," kata Roki. (Nov)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala BKN Hadiri Penyerahan SK 3.842 PPPK Paruh Waktu di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Penyerahan SK sebanyak 3.842 kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sidoarjo, Senin (17/11)

kemarin, dihadiri langsung oleh Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan dalam sambutannya menyampaikan selamat. Selanjutnya

► ke halaman 11



alikus/bhirawa.

Kepala BKN RI Prof Zudan Arif saat foto bersama dengan para PPPK Paruh waktu di Kabupaten Sidoarjo.

HARIAN
Bhirawa
Bhelo Belger Bhelo Gendot

✓ Kepala BKN Hadiri Penyerahan SK 3.842 PPPK Paruh Waktu di Sidoarjo

● Sambungan hal 1

nya para PPPK paruh waktu di Kabupaten Sidoarjo itu, diharapkan kedepan bisa membantu merealisasikan visi dan misi Bupati Sidoarjo dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

"Kabupaten Sidoarjo saat ini maju sekali, itu harus disyukuri dan harus terus dijaga," kata Prof Zudan, dalam sambutannya.

Jumlah hampir 4 ribu PPPK paruh waktu yang menerima SK ini, menurutnya besar sekali. Belum tentu daerah lain mampu. Menurutnya itu karena perhatian Pemkab Sidoarjo kepada para pegawai.

Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam sambutannya juga menyampaikan selamat. Dalam acara yang digelar di parkir timur stadion gelora delta itu, Bupati Subandi, juga berpesan agar para PPPK paruh waktu tersebut, bisa mengimbangi dengan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, penyerahan SK PPPK paruh waktu

ini ada pada semua OPD di Pemkab Sidoarjo, sebanyak 49 OPD. Kecuali dari RSUD Notopuro Sidoarjo.

"Paling banyak berada di Dikbud Sidoarjo, sebanyak 1.431 dan paling sedikit ada di BPKAD sebanyak 2 orang. Pegawai yang tertua berusia 57 tahun," jelas Kepala BKD Sidoarjo, Drs Ahmad Misbahul Munir, dalam kesempatan itu.

Camat Tulangan, Asmara Hadi, dalam kesempatan itu menyampaikan di kecamatan Tulangan juga menerima PPPK paruh waktu. Namun, dirinya tidak hafal pasti jumlahnya.

"Semoga bisa membantu meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat," ujarnya singkat.

Dari BPR Delta Artha, yang hadir dalam kesempatan itu, sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang keuangan, juga menyampaikan selamat kepada mereka.

Dan BPR Delta Artha Sidoarjo, menyatakan akan siap melayani kebutuhan para PPPK paruh waktu di Kabupaten Sidoarjo tersebut. [kus.gat]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Polresta Fokuskan Edukasi dan Kesadaran Berlalu Lintas

SIDOARJO - Operasi Zebra Semeru 2025 resmi dimulai hari ini, Senin (17/11/25), dan berlangsung hingga dua pekan ke depan. Polresta Sidoarjo melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan sejumlah pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran operasi tersebut.

Di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025 dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Kegiatan juga dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, Wakapolresta AKBP Mohammad Zainur Rofik, pejabat utama, serta para Kapolda Sekjajaran Polresta Sidoarjo.

Operasi Zebra 2025 digelar serentak se-Indonesia mulai 17 hingga 30 November 2025. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas serta menekan angka fatalitas kecelakaan.

"Operasi Zebra Semeru 2025 digelar guna terwujudnya Kameltibcarlantas yang aman, nyaman, dan dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun

Baru dalam rangka Operasi Lilin Semeru 2025," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.

Dalam pelaksanaannya, operasi ini tetap mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Petugas akan lebih banyak memberikan teguran kepada pelanggar, terutama pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Jenis pelanggaran tersebut antara lain tidak memakai helm, melawan arus, dan melanggar batas kecepatan. Selain itu, sistem tilang elektronik (ETLE) tetap dioperasikan untuk mendeteksi pelanggaran melalui kamera pengawas.

Kapolresta Sidoarjo menambahkan bahwa Operasi Zebra Semeru 2025 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk tertib dan selamat di jalan.

"Operasi Zebra Semeru bukan semata penegakan hukum, tetapi juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena itu, kepada seluruh personel yang bertugas, berikan pelayanan terbaik dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara," tegasnya. • **Loe**



cs Dipindai dengan CamScanner
Apel gelar pasukan Operasi Zebra Semeru 2024 di Mapolresta Sidoarjo, Senin (17/11/25)

LOE/DUTA

DUTA
MASJIDIRAJA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



INSENTIF. Sekkab Gresik bersama Wabup dr Asluchul Alif menyerahkan insentif untuk hufadz.

Peningkatan layanan

Bupati Serahkan SK 3.862 PPPK Paruh Waktu

SIDOARJO - Nuansa haru dan bahagia menyelimuti Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo Senin (17/11/25). Di tengah langit kelabu, wajah-wajah ceria terpancar dari 3.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang akhirnya resmi menerima SK pengangkatan.

Setelah lama mengabdi, penantian panjang mereka akhirnya terbayar. Meski cuaca mendung, semangat mereka tidak surut saat mengikuti prosesi penyerahan SK PPPK Paruh Waktu secara digital oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Kepala BKN Republik Indonesia Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Senin (17/11/25).

Penyerahan ini menjadi momen-tum bersejarah bagi ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu yang telah mela-

lui proses seleksi panjang hingga resmi menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda.

Bupati H. Subandi menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk membangun generasi aparatur yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Ia berpesan agar status baru tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja dan moralitas.

"Diharapkan untuk seluruh ASN dan PPPK di Sidoarjo tidak hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan berakhlik, serta semangat melayani bangsa," tegas H. Subandi di hadapan ribuan PPPK.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemahaman sistem bagi para aparatur agar siap menghadapi tantangan modern. Tujuannya, agar ASN dan PPPK mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Dengan empati, integritas, dan kolaborasi, ASN Sidoarjo akan tumbuh menjadi aparatur yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi penggerak perubahan positif di tengah masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat SDM aparatur melalui pengangkatan PPPK. Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK menjaga nama baik daerah melalui kerja sama dan kolaborasi yang solid.

"Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang profesional, jujur, dan berintegritas. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar, dan itu hanya dapat diwujudkan jika seluruh aparatur bersatu padu," ucap Zudan.

Pelantikan massal ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan publik serta meningkatkan kapasitas birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ribuan PPPK yang dilantik siap ditempatkan di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis lainnya di lingkungan Pemkab Sidoarjo. • Loe



DUTA
MERDEKA



INFO MEDIA PERS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Lantik 3.862 P3K Paruh Waktu, Bupati Tekankan Integritas Pegawai



cs Dipindai dengan CamScanner

RESMI: Ribuan P3K paruh waktu saat ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Lapangan Parkir Timur GOR Delta.

KOTA-Sebanyak 3.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu resmi menerima SK pengangkatan dari Pemkab Sidoarjo. Penyerahan dilakukan dalam apel besar di Parkir Timur GOR Delta, Sidoarjo, Senin (17/11).

Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, Subandi dan diikuti

• Ke Halaman 10

Lantik 3.862 P3K...

ribuan pegawai dari berbagai OPD. "Kami ingin memastikan setiap ASN dan P3K bekerja dengan kompetensi sekaligus dan tanpa hati," ucapnya saat

andi, arahan dari BKN penting untuk memperkuat pemahaman pegawai terkait merit system dan arah reformasi birokrasi modern.

"Kami ingin aparatur Sidoarjo tumbuh sebagai penggerak perubahannya jika dia akan menjadi suatu

Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan akan pentingnya integritas

- sekanan akan pentingnya integritas ASN. Dia memastikan Pemkab Sidoarjo

Digitized by srujanika@gmail.com

Pihaknya menjamin seluruh proses

Pihaknya menjamin seluruh proses rekrutmen dan penempatan P3K paruh waktu dilakukan sesuai regulasi dan manajemen talents. "Tid-

lasi dan manajemen talenta. "Tidak ada batasan jarak untuk tubuh dan kebaikan". Lesean di dalam hal ini sengaja dilakukan.

Subandi mengungkapkan, proses pengangkatan P3K paruh waktu

—
—
—

toko ditutup," tegasnya

melalui perjalanan

melalui perjalanan panjangnya mem-

ran miras ilegal. (dik/vga)

ANSWER

Di akhir pengarahan, Sub
Dewan akan seluruh P3K

pesan agar seluruh P3K bekerja dengan rasa syukur dan ikhlas demi kemajuan daerah. Dia meminta mereka menjaga integritas, disiplin

mereka menjaga integritas, disiplin dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kami tipi Sidoarjo, mari bersama-sama membangun daerah ini dengan etos kerja yang baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya. (sai/vga)

gung jawab. pungkasnya. (salvga)

 RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Dukung Peningkatan UMKM Naik Kelas melalui Pameran

SIDOARJO-DPRD Sidoarjo terus mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Berbagai program, mulai dari pameran bazar, pelatihan, hingga digitalisasi dilakukan agar produk lokal lebih dikenal luas.

Bazar menjadi salah satu strategi penting untuk memperkenalkan produk langsung ke konsumen. Kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan produk, tetapi juga bertujuan menambah pelanggan serta meningkatkan omzet penjualan UMKM.

Juga, dengan adanya pelatihan dan seminar agar semakin berdaya saing terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya melalui ajang pameran produk lokal yang dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa pameran menjadi sarana strategis bagi UMKM untuk naik kelas dan memperkenalkan produk unggulan mereka.

Menurut Abdillah, pameran tidak hanya memberikan ruang ekspress bagi UMKM, tetapi juga menjadi titik temu antara produsen dan calon mitra.

"Pameran adalah momen untuk menunjukkan kualitas produknya. Di sini mereka bisa mendapatkan masukan, peluang kerja sama, dan akses pasar yang mungkin sebelumnya belum terjangkau," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya mendorong penciptaan ekosistem UMKM yang kuat melalui berbagai dukungan, seperti pelatihan, kemudahan perizinan, dan pendampingan pemasaran. Namun, Abdillah menekankan bahwa pelaku UMKM juga harus aktif berinovasi.

"Agar bisa naik kelas, UMKM harus berani memodernisasinya, baiknya dalam hal teknologi digital dalam pemasaran," kata politisi PKB tersebut.

Nasih berharap melalui pameran yang rutin diselenggarakan, semakin banyak pelaku UMKM Sidoarjo yang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. "Kami ingin UMKM Sidoarjo tidak hanya tumbuh, tetapi juga naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Kamis (13/11).

Kendati demikian, terdapat tantangan bagi pelaku UMKM yakni dalam hal peningkatan mutu produk, distribusi yang merata, dan harga yang bersaing. Hal itu menjadi fokus Komisi B agar produk lokal mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

Terkait digitalisasi, DPRD mendorong pembukaan gerai penjualan online bagi UMKM. Selain itu, pendampingan terkait izin ekspor juga disiapkan, mengingat tiap negara memiliki regulasi berbeda-beda.

Kusumo menekankan, pembinaan UMKM tidak hanya soal promosi dan penjualan. Pelaku UMKM juga diperlukan terus berinovasi, menjaga standar mutu, serta menyusulkan desain dan kemasan agar lebih menarik bagi konsumen.

"Pelatihan ekspor dan pengemasan produk menjadi fokus penting bagi kami. Kami ingin produk lokal Sidoarjo bisa menembus pasar internasional," ucapnya.

Terakhir berharap, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Bantuan teknologi maupun promosi digital, selaku usaha diharapkan mampu meningkatkan omzet dan memperluas jaringan pelanggan.

"Teruslah berinovasi, jaga kualitas, dan manfaatkan peluang digital, produk lokal Sidoarjo harus bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional," tutupnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Sidoarjo, Edi Kurniadi telah merancang sejumlah program prioritas untuk mendukung UMKM agar bisa naik kelas. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan serta daya saing pelaku UMKM Sidoarjo.

"Kami akan fokus pada beberapa aspek, seperti peningkatan kemampuan manajemen, pengembangan produk, dan pemasaran hingga mempermudah perizinan," katanya.

Langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara terintegrasi. Sehingga setiap aspek program bisa saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi UMKM. "Kami akan melibatkan beberapa stakeholders, seperti perbankan, lembaga pelatihan, dan asosiasi UMKM," pungkasnya. (sal/vga)

• Ka Halaman

DPRD Sidoarjo...

Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan, pelatihan ini mencakup pembuatan produk, operasional, dan cara menjaga stabilitas pasar agar UMKM tetap eksis," jelasnya.

"Selain itu, akan terus dilakukan pendampingan agar UMKM, termasuk KUA daerah. Tujuannya agar pelaku usaha memiliki dana yang cukup untuk

mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.

Selain itu, kegiatan bazar dilakukan secara berkelanjutan agar UMKM tidak hanya aktif saat event besar. Wadah promosi yang terus tersedia diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan omzet."

Ketua DPRD Sidoarjo mengingatkan agar pelaku UMKM, termasuk KUA daerah, terus berusaha diharapkan agar produk lokal dapat menjangkau pasar lebih luas, baik dalam negeri maupun luar negeri," terangnya.

"Pelaku UMKM harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produk, publikasi online yang konsisten menjadi kunci agar produk lokal bisa menembus pasar internasional," pesannya.

Gus Wawan berharap, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Bantuan teknologi maupun promosi digital, selaku usaha diharapkan mampu meningkatkan omzet dan memperluas jaringan pelanggan.

"Teruslah berinovasi, jaga kualitas, dan manfaatkan peluang digital, produk lokal Sidoarjo harus bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional," tutupnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Sidoarjo, Edi Kurniadi telah merancang sejumlah program prioritas untuk mendukung UMKM agar bisa naik kelas. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan serta daya saing pelaku UMKM Sidoarjo.

"Kami akan fokus pada beberapa aspek, seperti peningkatan kemampuan manajemen, pengembangan produk, dan pemasaran hingga mempermudah perizinan," katanya.

Langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara terintegrasi. Sehingga setiap aspek program bisa saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi UMKM.

"Kami akan melibatkan beberapa stakeholders, seperti perbankan, lembaga pelatihan, dan asosiasi UMKM," pungkasnya. (sal/vga)

layout: hadi

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kusumo Adi Nugroho Komisi B DPRD Minta Pemkab Lindungi Meja Makan Rakyat Sidoarjo dari Mafia RPH Ilegal di Krajan



Sidoarjo, Ruang.co.id — Komisi B DPRD Sidoarjo mengebrak Krajan, setelah menemukan dugaan praktik mafia pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) ilegal yang diduga melengkapkan pemotongan sapi selongsongan. Kamis (13/11/2023). Sanksi dilakukan untuk menjaga kesehatan warga Sidoarjo Barat (Sibar), yang maraknya kesehatan kebersihannya terancam oleh daging tak layak konsumsi. Sidak dipimpin Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, bersama tim sukarela dari Disnappertan DLHK, MUI Krajan, Satpol PP, TNI, dan Polri. Ketika rombongan tiba tepat di depan UPTD RPH Krajan, petugas menemukan RPH ilegal milik H. Sain, warga Krajan RT 29 Krajan, yang beroperasi tanpa izin selama dua tahun. Petugas mendapati enam ekor sapi dipotong per hari, terdiri dari tiga sapi jantan dan tiga sapi betina. Tidak ada sistem penampungan limbah, tidak ada jurnu sembelih bersertifikat, tidak ada sertifikat halal, dan limbah kotoran justru dibuang langsung ke sungai belakang bangunan. Melihat kondisi memprihatinkan itu, Kusumo menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini tidak bisa ditoleransi.

"Saya minta aparat penegak hukum bertindak tegas, RPH ilegal dan pemotongan sapi selongsongan harus kita hentikan. Aturannya jelas, semua harus berizin. Jangan main-main dengan kesehatan rakyat," tegas Kusumo. Ia menambahkan bahwa Komisi B secara resmi merekomendasikan Disnappertan, DLHK, dan kepolisian untuk menyusun tindakan hukum konkret. "Aktivitas yang jelas-jelas melanggar aturan pemerintah tidak boleh dibiarkan. Limbah yang dibuang ke sungai itu keterlaluan dan sangat membahayakan," ujarnya. Dari aspek regulasi, pemotongan hewan wajib menaiki UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mensatur standar kesehatan, sertifikasi halal, higienitas, sanitasi, serta pengelolaan limbah melalui IPAL.

Peraturan ini diminta melalui Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Perwilegaraan Pemotongan Hewan, yang mensyaratkan izin usaha, izin lokasi, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta standar bangunan minimal dinding berkeramik tiga meter. Perwakilan Disnappertan Sidoarjo, dr. Nunung, menegaskan kembali kewajiban izin reuni. "Semua RPH harus berizin. lengkap dengan sertifikasi halal, higienitas, sanitasi, dan IPAL. Banyak RPH liar masih beroperasi dan praktik penzelongsongan itu sangat berbahaya bagi masyarakat," katanya. Anak dari pemilik RPH, yang tidak ingin disebutkan namanya setelah dideak parlemen yang sidak akhirnya mengetahui bahwa usaha tersebut tidak memiliki izin.

"Ya, kami belum punya izin. Nanti saya urus. Limbahnya langsung saya buang ke kali," ujarnya. Keberanian Kusumo Adi Nugroho dan Komisi B DPRD Sidoarjo mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, terutama warga di kawasan Kecamatan Krajan. Karena selama ini maraknya keberadaan RPH – RPH seperti itu tidak ada satu aparat pun yang berani menindak tegas, analisis sampai menutup usaha mereka. Sidak ini menjadi alarm keras dari Komisi B DPRD Sidoarjo, agar APH dan Pemkab segera bertindak tegas terhadap RPH ilegal dan nafak. Mengingat bahwa keamanan pangan bukan sekadar soal aturan, melainkan soal keselamatan keluarga di meja makan setiap hari.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Momentum Bersejarah di Sidoarjo, 3.862 PPPK Paruh Waktu Terima SK di Tengah Nuansa Haru



SIDOARJO, SOROTMATA.COM – Nuansa haru dan bahagia membalut di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo. Di tengah langit yang kelabu mengandung awan hitam, wajah-wajah ceria justru nampak kepada 3.862 Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ya, setalah lama mengabdi, akhirnya ujung penantian itu tiba. Meskipun langit tertutup awan pekat, mereka tetap semangat dan nampak khusyu mengikuti prosesi penyerahan SK PPPK Paruh Waktu secara digital oleh Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (17/11/2025).

Penyerahan tersebut menjadi momentum bersejarah bagi ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu. Mereka menempuh perjalanan panjang dalam proses seleksi, hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Turut dihadiri oleh Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh; Pt. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk membangun generasi aparatur yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Ia berpesan agar status baru ini diimbangi dengan peningkatan kinerja dan moralitas. "Diharapkan untuk seluruh ASN dan PPPK di Sidoarjo tidak hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan berakhlik, serta semangat melayani bangsa," tegas H. Subandi di hadapan ribuan PPPK. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bagi para aparatur untuk memahami sistem agar siap menghadapi tantangan modern. Tujuannya, agar ASN dan PPPK mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

"Dengan empati, integritas, dan kolaborasi, ASN Sidoarjo akan tumbuh menjadi aparatur yang tidak hanya menjalankan tugas administratif saja, melainkan menjadikan penggerak perubahan yang positif di tengah masyarakat," tegasknya. Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat SDM aparatur melalui pengangkatan PPPK. Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk menjaga nama baik daerah melalui kerja sama dan kolaborasi yang solid.

"Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang profesional, jujur, dan berintegritas. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar, dan itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh aparatur bersatu padu," kata Zudan. Pelantikan massal ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat

peningkatan kinerja publik sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ribuan PPPK yang dilantik hari ini siap ditempatkan di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tinjau Proyek Kureksari hingga Tambakrejo, Bupati Sidoarjo Soroti Devisasi dan Mutu Beton



Gema Nusantara - Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung meminjam sejumlah proyek betonisasi di wilayah Wates pada Sabtu (15/11). Agenda inspeksi mendadak tersebut diawali dari ruas Jalan Kureksari - Kepuhkiriman. Saat berkeliling di lokasi, Subandi menemukan beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk keberadaan bangunan rumah yang belum dilengkapi surat resmi. "Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kita koreksi. Terutama masalah rumah yang belum ada suratnya. Ini tetap akan segera kita tindak lanjuti. Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo nanti akan mensosialisir bersama BPN terkait pembonskarananya," ujar Subandi.

Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyoroti pentingnya kebersihan area proyek, terutama sisa material galian. Ia meminta proses penyejahteraan tidak mengecualikan aktivitas kawasan sekitar yang merupakan zona industri. "Setelah galian dikeluarkan, harus ada pembersihan. Ini daerah industri jadi harus bersih agar tidak mengecualii," tegaskannya. Untuk memastikan progres tetap sesuai rencana, Subandi mencek kembali pekerjaan di ruas Kureksari - Kepuhkiriman. Dengan waktu tersebut 40 hari, ia mencatat tidak ada deviasi yang menakutkan. Kondisi berbeda ditemukan saat memeriksa proyek di Jalan Kadungrejo - Wedungarsi. Di titik Berbek, deviasi cukup signifikan ternantang.



"Di Jalan Kadungrejo-Wedungarsi ternantang di Berbek deviasinya -18%. Densus waktu empat hari, jalur tidak akan rusak. Ceramah apa? Ya hanya lebur, ditambah shift. Kalau tidak maka tidak selesai. Selain itu pembersihan juga penting karena banyak material galian di sisi kanan jalan dan pasti untuk dikontrol sama Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo," jelasnya.

Sidak kemudian dilanjutkan ke Tambak Sumur dan Tambakrejo. Di Tambak Sumur, penyejahteraan dimulai berjalan baik, walupun zonk kebersihan masih butuh perbaikan. Sedangkan di Tambakrejo, Subandi memberi perhatian serius pada kualitas basah betonisasi. Ia mendanati beberapa bagian tempi beton yang salah (protokol), padahal spesifikasi yang disanakan adalah K-450. "Ini mestinya tidak boleh. Alasan apa pun tidak bisa dibenarkan. Beton K-450 bahasane wong loro wis gompol. Ini sebaagi koreksi bagi pelaksana agar kualitas tetap terjaga," tegaskannya.

Meski sejumlah masalah ditemukan, Subandi juga mencatat adanya progres positif di beberapa titik. Seperti di Tambakrejo, realisasi pekerjaan telah mencapai 48% dari target hampir 11%. Surplus 26% itu dimulai memungkinkan kerja lapangan yang cukup baik. Subandi kembali menekankan bahwa penyuatuhan menjadi kunci utama dalam memastikan mutu pembangunan. Ia meminta Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo, Dwi Eko Santono, beserta tim Diperbaiki oleh Subbag-Persidangan/Risdatih dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo hingga kecocokan ukuran jalan sesuai RAB. "Penyuatuhan ini penting. Kualitas bagus atau tidak tergantung penyuatuhan. Kalau lebarnya lima meter, harus dicek lima meter. Kalau empat meter, dicek empat meter. Pemberian juga harus sesuai RAB. Kalau penyuatuhan basah, kualitas pasti basah," tuturnya. (Lisa-Arya)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fraksi PKB DPRD dan DPC PKB Sidoarjo Komitmen Teladani Nilai Perjuangan Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah



KETIK, SIDOARJO – KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia sejak belum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Mengingat jasa-jasa Bapak Bangsa itu, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo dan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo mengadakan syukuran. Gus Dur adalah pahlawan bagi semua. Syukuran berlangsung di tengah-tengah kejubukan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo pada Jumat (14 November 2025). Tumpeng sudah disajikan oleh Fraksi PKB di ruang rapat. Menjelang pertemuan Banggar DPRD Sidoarjo dan TAPD Pemkab Sidoarjo, syukuran pun dimulai. Baik untuk Pahlawan Nasional Gus Dur, ulama kharijmatik KH Syaikhona M. Cholil dari Madura, maupun pahlawan buruh dari Porone Sidoarjo, Marsinah.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashi dan Ketua Fraksi PKB M. Dhamroni Chaudori menyundang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo Fenny Apriadiawati. Syukuran untuk Gus Dur yang juga Presiden Ke-4 RI tersebut berlangsung khidmat. Anggota Banjar DPRD Sidoarjo menutup anggota TAPD Pemkab Sidoarjo berdoa bersama. Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo M. Dhamroni Chaudori memotong tumpeng dan memeratkannya kepada Fenny Apriadiawati. Setelah itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashi giliran memberikan potongan tumpeng kepada Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andoko. Syukuran berlangsung henset. Perwakilan fraksi-fraksi anggota Banjar DPRD Sidoarjo juga hadir. Di antaranya, Choirul Hidayat dari Fraksi PDIP, Muzayyin Safril dari Fraksi Gerindra, Dery Haryanto dari Fraksi PKS-PPP, dan lain-lain. Dari TAPD, terlihat hadir juga Kepala Banseda Sidoarjo yang juga Asisten I M. Ajur Rahman Ap MSI, Asisten II M. Mahmud, Asisten III Benny Airlangga Yogaswara serta perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sidoarjo.



Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nashi mensatakan, Gus Dur, KH Syaikhona Muhammad Cholil, dan aktivis buruh Marsinah merupakan figur teladan bagi bangsa. Ketiga tokoh tersebut terbukti memperjuangkan nilai-nilai besar bagi Indonesia. "Dari mereka, kita belajar bahwa perjuangan bukan hanya soal ketekunan, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," ungkap Abdillah Nashi. Gus Dur yang juga salah satu pendiri PKB, lanjut dia secara konsisten memperjuangkan dan memwariskan nilai-nilai pluralisme, neutralisme, anti-kekerasan, kemanusiaan, toleransi, kebhinekaan. Semuanya telah menentukan dirinya anak bangsa. "Inilah Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo prototipe perjuangan PAB ke depan. Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PKB terus berkomitmen dan konsisten mensekolahkan semangat toleransi, kemanusiaan, dan kebhinekaan di setiap lini kehidupan masyarakat," tutur Abdillah Nashi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo Gelar Sosialisasi Pengaruh Keluarga Sebagai Pendamping ASN



seputarindonesiatv.id | **Sidoarjo** - Dharma Wanita Persatuan Kab. Sidoarjo menyelenggarakan "Sosialisasi Pengaruh Keluarga Sebagai Pendamping ASN" Jumat, 14/11/2025. Kegiatan yang program kerja bidang sosial budaya Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 bertujuan memberikan wawasan yang strategis di dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan juga berdaya saing serta meningkatkan pemahaman anggota dharma wanita tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung tugas dan tanggung jawab ASN peserta dan undangan.

Dewan Panasabat DWP Kab. Sidoarjo dr. Hj. Srihatun Subandi hadir secara langsung dan membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya ia berpesan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dalam lingkungan keluarga nilai-nilai kejujuran, tangguhan, integritas, humbluh dan akan tercermin dalam pengabdian ASN kepada masyarakat. "Oleh karena itu, peran istri sebagai pendamping ASN menjadi sangat penting, tidak hanya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tetapi juga dalam memberikan dukungan moral, spiritual, dan emosional agar suami dapat menjalankan tugasnya dengan optimal serta Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan berintegritas."



Ia juga berharap berharap Sebagai pendamping ASN dapat memperbaiki wawasan mengenai pengaruh keterhadap keluarga baik dari aspek komunikasi, ekonomi, maupun nilai-nilai keaungan dan kebersamaan. Keluarga yang kokoh akan menghasilkan individu-individu yang tangguh, dan dari sanglah lahir ASN yang berkarakter serta berdaya saing. "Mari kita jadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah untuk saling menguatkan, saling belajar, dan saling menginspirasi. Dengan semangat mengabdi sepuhuh hati, kita dukung suami dalam pengabdianya.

sepada bangsa dan negara, serta kita wujudkan keluarga ASN yang harmonis, sejahtera, dan berdaya semoga apa yang kita peroleh hari ini memberikan manfaat bagi diri keluarga dan lingkungan kita." Dan pada sesi Inspirational Session bersama Learning Partner Tulus Widagdo yang me ajak bagaimana menciptakan Family Winning As a Team (Keluarga Tangguh Cinta yang Bertumbuh) peserta dapat berdialog serta sharing tentang keluarga dan suasana tersebut lebih krib dengan sejalan games yang menarik.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RPH Ilegal Krian-Sidoarjo Dapat Sorotan Komisi B, Kusumo: Minta APH Bertindak Tegas



SIDOARJO, PEWARTAPOS.COM – Maraknya Rumah Potong Hewan (RPH) Ilegal dan diatas pemotongan sapi selongsongan di Sidoarjo Barat (Siber) wilayah Krian. Bukan perkara mudah untuk menertibkan dan melegalkan mereka. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kamis (13/11/2025) Kusumo Adi Nugroho anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah RPH di Krian, yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispanpertan) Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Krian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), & petugas TNI dan Polri. Dari pantauan dilapangan, saat sidak terpantau UPTD RPH krian petugas menemukan rumah pemotongan bewan ilegal milik H. Sain warga Madura yang tinggal di Kraian RT 29 Krian. Saat di data petugas diperoleh keterangan bahwa RPH H. Sain tidak memiliki ijin pemotongan. Status lahananya sewa. Hewan ternak yang dipotong per-hari 6 ekor sapi terdiri dari 3 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina. Tidak memiliki penampungan dan pengolahan limbah. Serta tidak memiliki sertifikat halal dan jurni sembahil.

"Melibat kondisi ini. Tidak bisa dibizarkan. Aparat Penegak Hukum dan dinas terkait harus bertindak tegas. RPH Ilegal dan pemotongan sapi selongsongan harus ditertibkan dengan pungut hukum yang lebih jelas," teges Kusumo Adi Nugroho. "Karena status pemerintah sudah cukup jelas semuanya harus ada izin. Apa mau malang-malang aturan pemerintah," tegas Kusumo. saat menyayangi anak pemilik rumah potong sapi H. Sain. Dijelaskan Kusumo, kami mewakili Komisi B DPRD Sidoarjo merekomendasikan Dispanpertan, DLHK dan kepolisian untuk berkoordinasi menentukan tindakan hukum yang harus dilakukan. Khususnya bagi RPH ilegal yang tidak memiliki izin dan aktifitasnya mencemari lingkungan seperti yang ada di depan UPTD RPH krian ini," tegasnya.

Ia menambahkan, apakah kegiatan yang melanggar aturan pemerintah akan dibatasi terus. Jelas-jelas mereka tidak memiliki izin resmi. Analisa limbah kotoran sapi yang dipotong langsung dibuang ke kali yang ada dibelakang tempat usaha pemotongannya. Inikan keterlaluan dan negarur. Semestinya itu. Kepala Bidang Produk Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, dr. Toni Hartono melalui dr. Nurjizi menjelaskan bahwa RPH wajib bersih. Begitu pula pemotongan liar secara pasal sudah ditunangkan dalam Perda Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri masih banyak ditemui RPH liar tanpa dilengkapi izin. Begitu pula praktik pengelongsongan sapi yang tidak terlindungi kesehatannya bagi masyarakat konsumen.

Jadi tempat pemotongan RPH harus memiliki izin. Termasuk izin sertifikasi halal dan higienis sanitasinya. Untuk RPH milik Abdul Kadir sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko namun Izin lokasinya juga belum ada. Termasuk IPAL-nya kan masuk ke sawah. Selain itu Nomor kontrol Veteriner (NKV) juga hanya kecil saja. Standar NKV minimal dinding tembok harus berkemuk minimal 3 meter dari bayah. Hal tersebut untuk menjauhi kualitas daging yang dikonsumsi konsumen benar-benar hijeris.

Diketahui, bahwa RPH Ilegal H.Sain melalui anaknya menjual bahan selama dua tahun bersama, dua kegiatan usahanya memang tidak memiliki izin. "Saat ini memang masih belum mempunyai izin. Namun perencanaan akan membuat izin. Karena punya potong ini saya membeli," ungkapnya. Pihaknya juga menyatakan jumlah sapi yang dipotong malam ini empat ekor disana (barat) dan dua ekor sapi di rumah potong sebalah titur. Untuk pembuangan limbah kotoran langsung saya buang ke kali," ungkap anaknya yang tidak mau disebutkan namanya (zki)